

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Anggraeni (2013) tentang Kajian kinerja CSR Ptd Ltd Propinsi Jawa Timur (Kantor Administratif Sumenep) memperoleh hasil Nilai kesesuaian kinerja CSR Santos Ptd Ltd komponen ekologi sebesar 2.63, nilai tersebut tergolong dalam kriteria penilaian tertinggi pada kisaran 1-3 atau perusahaan telah menjalankan CSR sesuai dengan standard dan hampir memenuhi semua persyaratan dalam melaksanakan CSR berdasarkan *Oil and Gas Industry Sustainability Reporting (IPIECA)*, Indikator kinerja CSR perusahaan dianggap penting oleh *Stakeholders* eksternal perusahaan tetapi dalam pelaksanaannya belum sesuai harapan (*attribute to improve*), program CD tahap *output* indikator gaya hidup, pendapatan, dan tindak lanjut komunitas dan program CD *outcome* indikator kondisi fisik rumah warga, program pembinaan terhadap komunitas, tata kelola organisasi (*good governance*), inisiatif, adaptasi, otonomi dan integrasi atau harmonisasi sosial.

Maygarindra dan Maghviroh (2012) tentang Analisis alokasi dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* serta pelaporan *Sustainability Report* berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI G3)* di PT. Pembangkit Jawa Bali dengan menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan di dapat dan diolah memperoleh hasil terdapat bidang pendidikan, ekonomi sosial &

Masyarakat, kesehatan, kamtibmas & lingkungan hidup mendapatkan anggaran Dana masing-masing 25% dari jumlah anggaran. *Sustainability Report* perusahaan juga masih tergabung dalam *annual report* perusahaan, perusahaan tersebut menunjukkan konsistensinya dalam menjalankan program yang tercermin dari anggaran yang dialokasikan setiap tahun meningkat.

Estafianto (2014) tentang CSR PT Pertamina dan UNNES di Desa Ledok, Kecamatan Sambong Kabupaten Blora memperoleh hasil faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program CSR di Desa Landok terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung berupa partisipasi masyarakat, sarana dan prasana, tingkat SDM dan masyarakat juga berpengaruh dalam program ini, faktor kedua adalah faktor penghambat berupa potensi local. Potensi local yang dimaksud adalah kesulitan mencari bahan jagung dalam pengolahan makanan dari bahan dasar jagung dimana jagung merupakan potensi yang signifikan di Desa Lendok ini selain olahan jagung program budidaya belut juga mengalami kegagalan karena kondisi cuaca dan kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai budidaya belut.

Widenta (2013) objeknya berbeda dengan yang lain. Objek penelitian ini adalah perusahaan komunikasi yaitu perusahaan Indosat Tbk tahun 2007-2011. Hasil dari penelitian ini PT Indosat melaksanakan aktifitas nyata seperti yang diungkapkan disitus resminya www.csr-indosat.com dan dilaporkan di *sustainability report*, perusahaan ini juga melakukan

beberapa aspek indikator kinerja berdasarkan GRI *Guidelines*, diantaranya dampak ekonomi langsung, aspek energy, aspek keanekaragaman hayati, aspek emisi, limbah dan pengaliran limbah, aspek kesehatan dan keselamatan kerja, aspek pelatihan dan pendidikan serta kemasyarakatan dari 79 aspek yang ditetapkan oleh GRI. Biaya yang dianggarkan untuk program CSR selalu dipublikasikan atau dicantumkan dalam *Sustainability Report*.

Susanti dan Kholis (2014) hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2012 PKBL yang diimplementasikan adalah kegiatan kawasan bersinar yang berisikan berbagai macam kegiatan dan dilaporkan dengan sistem pelaporan menggunakan standar pengungkapan keberlanjutan yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative (GRI)* lengkap dengan *suplemen industry* ke listrikan yang telah diakui dan diterima secara international, subjek dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja dalam bidang program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT PLN Persero Distribusi Jawa Timur.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Anggraeni (2013) dimana dalam penelitian ini ruang lingkupnya semakin spesifik mulai dari penyusunan sampai pelaporan yang disajikan oleh Santos Ltd Sampang, dan penelitian lainnya sebagai pendukung, mulai dari metode pendekatan penelitian, jenis data, dan lain sebagainya.

B. Landasan Teori

1. Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Menurut Azheri(2011) CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan penerapan dari prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) dari 4 prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) yang terdiri dari Kewajaran, Transparansi, Akuntabilitas dan Responsibilitas. Menurut Mulyadi, (2003) CSR adalah kegiatan perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan kesukarelaan dan CSR tersebut dilakukan dengan motivasi yang beragam, tergantung pada sudut pandang bagaimana memaknai CSR itu sendiri.

Sebuah definisi yang luas mengenai CSR diungkapkan oleh *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, suatu asosiasi global yang terdiri dari sekitar 200 perusahaan yang secara khusus bergerak dibidang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menyatakan bahwa CSR adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaanya beserta seluruh keluarganya, Kotler dan Lee (2005).

Menurut *International Finance Corporation*, CSR didefinisikan sebagai: “*The commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employers and their representatives the local community and large to improve quality of life, in that are both*

good for business and good for development.” Definisi tersebut dapat diartikan sebagai komitmen dunia bisnis untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan.

Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan berfokus pada tiga hal, antara lain profit, lingkungan dan masyarakat. Dengan diperolehnya laba, perusahaan dapat memberikan dividen bagi pemegang saham, mengalokasikan laba yang diperoleh guna membiayai pertumbuhan dan pengembangan usaha dimasa depan, serta membayar kewajiban pajak bagi pemerintah. Dengan lebih banyak memberikan perhatian terhadap lingkungan sekitar, perusahaan turut berpartisipasi terhadap usaha pelestarian lingkungan dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Konsumen akan lebih loyal terhadap produk-produk yang dihasilkan perusahaan yang konsisten menjalankan CSR sehingga memiliki reputasi yang baik.

Keberadaan CSR yang telah dikenal semenjak tahun 1970an didukung sejumlah teori. Teori-teori yang berkaitan dengan CSR antara lain:

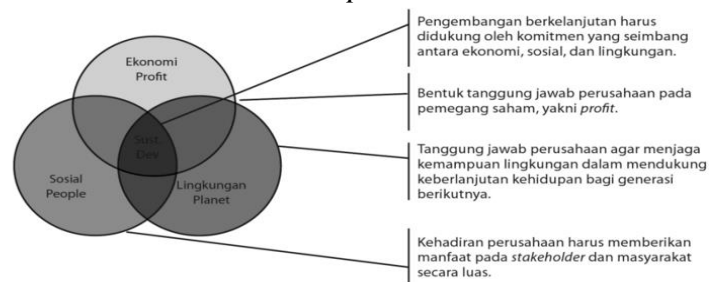
- a. Teori Piramida Teori piramida ditemukan oleh Carrol (2006). Dalam teori ini, CSR dapat dilihat melalui empat jenjang yang merupakan satu kesatuan. Gambar teori piramida tersebut menjelaskan empat jenjang

yang dilalui perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya. Jenjang yang pertama adalah Tanggung Jawab Etika dan Tanggung Jawab Ekonomi. Tanggung Jawab Etika adalah bagaimana suatu perusahaan menjadi perusahaan yang berperilaku etis, sedangkan Tanggung Jawab Ekonomi menjelaskan tanggung jawab perusahaan dalam meraih profit atau keuntungan. Setelah Tanggung Jawab Etika Tanggung Jawab Filantropis (Menjadi Perusahaan yang Baik) Tanggung Jawab Etika (Menjadi Perusahaan yang Etis) Tanggung Jawab Legal (Perusahaan yang mentaati hukum) Tanggung Jawab Ekonomi (Meraih Keuntungan) dan Ekonomi, jenjang selanjutnya adalah Tanggung Jawab Legal. Jenjang ini menjelaskan bagaimana perusahaan menjadi perusahaan yang taat pada hukum. Dan jenjang yang terakhir adalah Tanggung Jawab Filantropis. Tanggung Jawab Filantropis adalah bagaimana perusahaan menjadi perusahaan yang baik dan memiliki citra positif di mata masyarakat.

- b. *Teori Triple Bottom Line* Istilah *Triple Bottom Line* dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya “*Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*”. Elkington mengembangkan konsep *Triple Bottom Line* dalam istilah *economic prosperity, environmental quality dan social justice*. Selain mengejar *profit*, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Sedangkan, Menurut Hadi, (2011:56-58) konsep *triple bottom line* mengandung strategi integral dengan memadukan antara *social motive* dan *economic motive*. *Profit*, merupakan satu bentuk tanggung jawab yang harus dicapai perusahaan, bahkan mainstream ekonomi yang dijadikan pijakan filosofis operasional perusahaan, *profit* merupakan orientasi utama perusahaan. *People*, merupakan lingkungan masyarakat (*community*) di mana perusahaan itu berada. Mereka adalah para pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. *Planet*, merupakan lingkungan fisik memiliki signifikansi terhadap eksistensi perusahaan.

Gambar 2.1
Teori Triple Bottom Line



Sumber: Rachman et al., (2011)

Tren yang terjadi saat ini adalah perusahaan mencoba mengintergrasikan sejauh mungkin pelaksanaan program CSR yang dilaksanakan memiliki keterkaitan dengan rantai pemasok perusahaan, Sholihin (2009). Program CSR baru dapat menjadi berkelanjutan apabila program yang dibuat suatu perusahaan benar-benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam perusahaan itu sendiri tanpa adanya komitmen dan dukungan dengan penuh antusias dari karyawan, program-program tersebut bagaikan

program penembus dosa dari pemegang saham belaka. Dengan melibatkan karyawan secara intensif maka nilai dari program-program tersebut akan memberikan arti tersendiri yang sangat besar bagi perusahaan, Rachman et al., (2011).

2. Pelaporan *Corporate Social Responsibility*

Perusahaan perlu melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan CSR atau saat ini bisa disebut dengan laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*). *Sustainability Report* Memiliki definisi yang beragam, menurut Elkington (1997) *Sustainability Report* berarti laporan yang memuat tidak saja informasi kinerja keuangan tetapi juga informasi nonkeuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan (*sustainable performance*). Pelaporan *sustainability* akan menjadi perhatian utama dalam pelaporan nonkeuangan, Pelaporan ini memuat empat kategori utama yaitu: *business landscape*, strategi, kompetensi, serta sumber daya dan kinerja. Falk (2007).

Global Reporting Initiative (GRI) version 3.0 (2000-2006) menjelaskan bahwa laporan berkelanjutan adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Laporan keberlanjutan juga menggambarkan laporan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan

sosial (misalnya *triple bottom line*, laporan pertanggungjawaban perusahaan, dan lain sebagainya).

Saat ini implementasi pelaporan berkelanjutan di Indonesia didukung oleh sejumlah aturan seperti UU No. 23/1997 tentang manajemen lingkungan dan aturan yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia mengenai prosedur dan persyaratan *listing* dan juga Standar Laporan Keuangan (PSAK). *Sustainability Reports* perusahaan membutuhkan pedoman pelaporan berkelanjutan yang diterima secara nasional. Untuk tujuan tersebut, dibutuhkan sebuah Badan Nasional yaitu NCSR (*National Center for Sustainability Reporting*). Pengguna utama dari *Sustainability Report* antara lain, masyarakat atau komunitas, investor tanggung jawab sosial, bank, institusi pemerintah, dan manajemen dan karyawan.

Manfaat *Sustainability Report* berdasarkan pada kerangka GRI, yaitu:

- a. Sebagai benchmark kinerja organisasional dengan memperhatikan hukum, norma, undang-undang, standar kinerja, dan prakarsa sukarela.
- b. Mendemostrasikan komitmen organisasional untuk *sustainable development*, dan
- c. Membandingkan kinerja organisasional setiap waktu.

Laporan tanggung jawab sosial merupakan laporan aktivitas tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan baik berkaitan

dengan perhatian masalah dampak sosial maupun lingkungan. Laporan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan laporan tahunan (*annual report*) yang dipertanggungjawabkan direksi di depan sidang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laporan ini berisi laporan program-program sosial dan lingkungan perseroan yang telah dilaksanakan selama tahun buku berakhir, Hadi (2011:206).

3. ISO (*Internasional Organization for Standardization*) 26000

ISO (*Internasional Organization for Standardization*) sebagai induk organisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (*working group*) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*.

Pengaturan untuk kegiatan ISO dalam tanggung jawab sosial terletak pada pemahaman umum bahwa *social responsibility* sangat penting untuk kelanjutan suatu organisasi. Pembentukan ISO 26000 diawali ketika badan ISO meminta *ISO on Consumer Policy* atau COPOLCO merundingkan penyusunan standar *Corporate Social Responsibility*. Selanjutnya badan ISO tersebut mengadopsi laporan COPOLCO mengenai pembentukan *Strategic Advisory Group on Social Responsibility* pada 2002. ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat, baik di Negara berkembang maupun Negara maju. ISO 26000 ini memberikan tambahan nilai terhadap aktifitas tanggung jawab sosial dengan cara:

- a. Mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya
- b. Menyediakan pedoman tentang penerjemah prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif,

- c. Memilah praktik-praktik terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.

ISO 26000 ini mengandung 7 isu pokok, yaitu: pengembangan masyarakat, konsumen, praktik kegiatan institusi yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan *organizational governance* (pengusaan organisasi). Dari 7 isu pokok ini diwujudkan dalam bentuk aktifitas terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis, seperti:

- a) Konsisten dalam pembangunan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
- b) Memerhatikan kepentingan dari para *Stakeholder*, baik *stakeholder internal* maupun *eksternal*.
- c) Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional.
- d) Terintegrasi diseluruh aktifitas organisasi dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

Corporate Social Responsibility mencakup *Community Development* atau *Comdev* dan TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) hubungan dari ketiganya menurut Menteri Lingkungan Hidup dalam buku Pedoman CSR konsep CSR erat kaitannya dengan konsep pengembangan masyarakat atau *community development* dimana merupakan bagian penting dalam proses implementasi CSR. Sementara TJSL sebagaimana tertera dalam pasal 77 UU No. 40/2007 tentang perseroan terbatas merupakan kepatuhan perusahaan kepada peraturan sektoral yang sudah ada. TJSL bersifat wajib dimana dalam pelaksanaannya harus mengacu kepada semua aturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan

hidup. Setelah perusahaan melaksanakan seluruh TJSL dengan mematuhi segala hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan jenis usaha perusahaan tersebut, KLH sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan, akan terus mendorong perusahaan tersebut untuk melaksanakan kegiatan CSR bidang lingkungan.

4. Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Menurut (“SKKMIGAS » Profil,” n.d.) Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah republic Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 9/2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha Hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontak Kerja Sama.

Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik Negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut SKK Migas menyelenggarakan fungsi:

- Memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja sama.

- Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama.
- Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan.
- Memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya
- Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
- Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; dan
- Menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Sedangkan menurut Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, (2013) mengatakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (disingkat:SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Badan ini menggantikan BPMIGAS yang dibubarkan Mahkamah

Konstitusi pada 13 November 2012 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (disingkat: BPMIGAS) adalah lembaga yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 16 Juli 2002 sebagai pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran migas Indonesia. Dengan didirikannya lembaga ini melalui UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta PP No 42/2002 tentang BPMIGAS, masalah pengawasan dan pembinaan kegiatan Kontrak Kerja Sama yang sebelumnya dikerjakan oleh PERTAMINA selanjutnya ditangani langsung oleh BPMIGAS sebagai wakil pemerintah. Badan ini dibubarkan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya pada 13 November 2012 karena bertentangan dengan UU 1945.

5. Kontraktor Kontrak Kerja Sama Santos Balok Sampang

Kontraktor Kontrak Kerja Sama adalah Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap, sebagaimana disebut dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Perusahaan minyak dan gas Australia Santos Limited (Santos melalui anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki (Sampang) Pty Ltd) dan rekanannya dibentuk untuk mengamankan sebagai pasar gas di Jawa Timur dan mulai berkembang setelah penandatanganan perjanjian

jangka panjang yang baru untuk menjual lebih dari 90 Miliar Kubik (BCF) gas. Santos dan rekanan telah menandatangani Perjanjian Penjualan Gas (GSA) dan PT Power Indonesia untuk memasok minimal 40 juta kaki kubik gas per hari sampai sepuluh tahun yang nantinya untuk cadangan seluruh bidang Oyong.

Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan Usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.

- a) Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi geologi untuk menentukan dan memperoleh perkiraan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
- b) Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah kerja yang ditentukan yang terdiri dari pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengelolaan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi dilapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

6. Pedoman yang dikeluarkan oleh SKK Migas untuk kegiatan migas di Indonesia

SKK Migas selaku pihak yang berwenang dalam pengawasan, pengendalian dan evaluasi mempunyai sebuah pedoman yang diberlakukan untuk semua Kontraktor yang ada di Indonesia. Pedoman ini selanjutnya dijadikan pedoman untuk melakukan

sebagaimana semestinya, pedoman ini dibuat tahun 2004 dan diresmikan sebagai pedoman pada tahun 2005 oleh BPMIGAS (PTK/017/PTK/III/2005). Pedoman berupa pedoman tata kerja yang berisikan 3 buku, yaitu:

a) Buku pertama tentang pemberian keterangan keadaan darurat

Buku pertama ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi antara fungsi hupmas Kontraktor KKS dengan BPMIGAS pada saat memberikan keterangan keadaan darurat yang terjadi dilapang, kantor atau fasilitas Kontraktor KKS lainnya. Buku pertama ini terdiri dari 9 BAB yang menjelaskan tentang bagaimana suatu keadaan darurat tersebut hingga alur komunikasi ke pihak BPMIGAS dan sebagainya.

b) Buku kedua tentang Pengembangan Masyarakat

Buku kedua ini sebagai pedoman pengembangan Masyarakat terdampak. Pedoman ini sebagai acuan bagi kontraktor Kontrak Kerja Sama (kontraktor KKS) dalam melaksanakan program CD (*Commonity Development*) guna memerlancar pelaksanaan kegiatan operasi dilapangan. Pedoman ini terdiri dari X bab yang berisikan tentang landasan hukumnya apa, fungsi programnya bagaimana, bidang-bidang yang harus dikembangkan apa saja, penyiapan dan persetujuannya bagaimana, komunikasi dengan BPMIGAS bagaimana dan sebagainya lengkap dengan pelaporan programnya seperti apa.

c) Buku ketiga tentang Kehumasan

Buku ketiga dan terakhir ini adalah tentang kehumasan atau hubungan masyarakat baik internal maupun eksternal. Pedoman kehumasan ini sebagai acuan bagi KKKS dalam melakukan koordinasi serta menjalankan program kehumasan guna memperlancar pelaksanaan kegiatan operasi. buku ketiga ini terdiri dari 11 bab yang berisikan apa saja fungsi dan peran kehumasan lengkap dengan sanksi dan laporan dalam menjalin hubungan antara BPMIGAS dan KKKS.

